

IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN DI DESA NGADIREJO KECAMATAN RENGEL KABUPATEN TUBAN

Defi Nur Safitri¹, Ahmad Suprastiyo², Cahya Lukito³
Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Bojonegoro
Jl. Lettu Suyitno No 2 Bojonegoro
Email: tiyopras207@gmail.com

Abstract

The Family Hope Program is a program of providing conditional social assistance to poor and vulnerable families who are registered in the DTKS and designated as KPM PKH. The purpose of this study was to determine the implementation of the Family Hope Program (PKH) in improving the level of education in Ngadirejo Village, Rengel District, Tuban Regency. The type of research in this research is descriptive research with a qualitative approach. This study focuses on the implementation of the family of hope program in increasing the level of education by using the four implementation factors proposed by George Edwards III, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results showed that the attitude of the implementers of the PKH Facilitator in Ngadirejo Village were lacking in supervision, and the group leader was less transparent in delivering information. This caused the beneficiaries to lack information so that the beneficiaries used PKH assistance for other purposes. The communication factor in the implementation of PKH in increasing the level of education has not been achieved, this is caused by a lack of socialization. In the resource factor, there are inhibiting resources and supporting resources. The absence of a complete management structure is an obstacle in the implementation of the PKH program. Disposition factors, the performance of PKH facilitators lack of supervision and lack of conveying information to group leaders. Bureaucratic structure, Coordination carried out by group leaders and assistants is one of the efforts to achieve PKH goals optimally.

Keywords: Implementation, PKH Program, Education

Abstrak

Program Keluarga Harapan merupakan salah satu program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam DTKS dan ditetapkan sebagai KPM PKH. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Peningkatan Taraf Pendidikan di Desa Ngadirejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban. Adapun jenis penelitian pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berfokus pada implementasi program keluarga harapan dalam peningkatan taraf pendidikan dengan menggunakan empat faktor implementasi yang dikemukakan oleh George Edwards III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap pelaksana dari pihak pendamping PKH Desa Ngadirejo yang kurang melakukan pengawasan, dan ketua kelompok yang kurang transparan dalam penyampaian informasi. Hal ini menyebabkan warga penerima bantuan kurang mendapatkan informasi sehingga para penerima bantuan menggunakan bantuan PKH untuk keperluan lain. Faktor komunikasi pada implementasi PKH dalam peningkatan taraf pendidikan belum tercapai, hal ini di sebabkan oleh kurangnya sosialisasi. Pada faktor sumberdaya terdapat sumberdaya penghambat serta sumberdaya pendukung. Belum terdapat struktur kepengurusan yang lengkap menjadi hambatan dalam pelaksanaan program PKH. Faktor disposisi, kinerja pendamping PKH kurang melakukan pengawasan dan kurangnya menyampaikan informasi ketua kelompok. Struktur birokrasi, Koordinasi yang dilakukan oleh ketua kelompok dan pendamping merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan PKH secara optimal.

Keywords : Implementasi, Program PKH, Pendidikan

PENDAHULUAN

Kesejahteraan sosial merupakan suatu proses atau usaha terencana yang dilakukan oleh perorangan, lembaga-lembaga sosial, masyarakat maupun badan-badan pemerintah untuk meningkatkan kualitas kehidupan melalui pemberian pelayanan sosial dan tunjangan sosial (Suharto,2006:3). Salah satu hambatan untuk mencapai kesejahteraan sosial ialah masalah kemiskinan.

Salah satu tujuan dari penyelenggaraan pemerintah ialah mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan tindakan atau keputusan pilihan yang diambil oleh lembaga pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.

Kebijakan publik merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan memiliki manfaat untuk masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan publik yang penting dalam suatu negara ialah kebijakan sosial. Salah satu tujuan dari ditetapkannya kebijakan sosial yakni untuk melindungi serta memenuhi hak – hak sosial orang maupun warga negara diantaranya orang miskin. Perlindungan sosialnya meliputi bantuan sosial, jaminan sosial, serta asuransi sosial, serta yang menjadi sarannya yaitu keluarga miskin, anak – anak, lansia, korban bencana alam, dan sebagainya.

Program Keluarga Harapan (PKH) ini merupakan suatu program yang memberikan bantuan yang berupa uang tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) dengan syarat harus mengikuti persyaratan yang diwajibkan. Persyaratan yang dimaksud yakni terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yaitu pendidikan dan kesehatan.

Program Keluarga Harapan (PKH) terfokus pada dua komponen yang berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia yaitu bidang kesehatan dan pendidikan. Dan kemudian dimana setiap masyarakat berhak

mendapat pelayanan kesehatan maupun pelayanan pendidikan bagi yang belum bisa menyelesaikan pendidikan formal, informal, maupun non formal.

Dalam proses implementasi program PKH terdapat tahapan-tahapan yaitu perencanaan, penetapan calon peserta PKH, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, penyaluran bantuan, pendampingan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), verifikasi komitmen, pemuthakiran data, transformasi kepesertaan PKH, sistem pengaduan masyarakat, e-PKH (Buku pedoman PKH 2020:21). Dan dari tahapan tersebut terdapat kendala yaitu pada sinkronisasi data dari pusat sehingga menyebabkan keterlambatan turunnya dana bantuan PKH ini serta kurangnya pengawasan dari pihak pendamping PKH.

Di Indonesia, semua penduduk wajib belajar selama dua belas tahun, enam tahun di Sekolah Dasar (SD), tiga tahun di jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan tiga tahun di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Saat ini, pendidikan yang ada di Indonesia di atur Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jenjang pendidikan merupakan tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik.

Jalur pendidikan di indonesia di bagi menjadi 3 yaitu 1. Pendidikan formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah - sekolah umum pada umumnya, 2. Pendidikan non formal sering kali kita dapati pada anak usia dini yaitu TPA, yang terdapat di masjid dan sekolah pada hari minggu, 3. Pendidikan informal ialah jalur pendidikan keluarga atau lingkungan berbentuk kegiatan belajar mandiri.

Rendahnya tingkat pendidikan akan mengakibatkan seseorang cenderung

memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang kurang memadai.

Sementara itu jumlah angka anak putus sekolah di tahun ajaran 2019/2020 masih terdapat masalah pendidikan yang menjadi tertundanya masa depan anak dikarenakan putus sekolah. Jumlah anak putus sekolah di Indonesia tahun ajaran 2019/2020 berjumlah 159.075 anak di semua jenjang yang merupakan gabungan dari sekolah negeri maupun swasta. Dan mirisnya sejak SD sudah putus sekolah sekitar 59.443 anak dan sekitar 38.464 anak yang putus sekolah jenjang SMP dari sekolah Negeri maupun sekolah swasta (Sumber data dari Kemendikbud, diolah Bang Imam Berbagi, 2020).

Di Kabupaten Tuban jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terdapat 53.515 KPM, sedangkan di Kecamatan Rengel terdapat 3.123 KPM dari data kecamatan tersebut Desa Ngadirejo merupakan salah satu desa yang terdapat 195 warga penerima bantuan PKH yang terdiri dari 50 dari dusun Gemblo Raseh, 74 dari dusun Jetis dan 71 dari dusun Tawangsari. Fokus dari program bantuan ini adalah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Sumber data dari Pemerintah Desa Ngadirejo dan Pendamping PKH Desa Ngadirejo).

Pada data rekap lulusan sekolah menengah atas yang ada di Desa Ngadirejo masih tergolong minim hanya berjumlah 246 jiwa dan jumlah lulusan sekolah dasar berjumlah 1271 jiwa. Dan dari 195 warga penerima bantuan PKH ini yang berusia lebih dari 18 tahun sampai dengan 50 tahun di Desa Ngadirejo hanya beberapa orang saja yang sudah mengenyam pendidikan sampai jenjang menengah (Sumber data: Pemerintah Desa Ngadirejo).

Dengan adanya program bantuan PKH ini yang seharusnya jumlah angka lulusan sekolah menengah atas harus lebih tinggi dari jumlah angka lulusan sekolah dasar. Hal ini disebabkan para penerima

program keluarga harapan belum memanfaatkan bantuannya untuk meningkatkan taraf pendidikan mereka. Ditinjau dari beberapa faktor-faktor implementasi dari program Keluarga Harapan (PKH) terdapat kendala.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Bojonegoro. Fokus penelitian ini ialah 1) komunikasi, 2) Sumber Daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi Pengambilan informan penelitian menggunakan teknik *purposive and snowball sampling*, dalam proses penelitian terinventarisir sumber data primer sebanyak 11 informan.

Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder dengan cara observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dalam menganalisa menggunakan teknik analisis data interaktif *Model miles and Huberman*, yang mengemukakan bahwa “aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktifitas dalam analisis data, yaitu *data reduction, data display and conclusion drawing/verifying*” (Sugiyono dalam Suprastiyo, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Komunikasi

Program Keluarga Harapan sudah berjalan di Desa Ngadirejo tahun 2007, dengan metode penyampaian informasi di sampaikan oleh Pendamping PKH yang merupakan delegasi dari kecamatan. Pada awalnya tahun 2007 pendamping PKH menyelenggarakan pertemuan dengan warga masyarakat penerima bantuan PKH yang dilaksanakan di Balai Desa Ngadirejo. Dan setelah dilakukan sosialisasi (pertemuan) di balai desa kemudian penyampaian informasi

tersebut dilakukan di rumah setiap masing-masing ketua kelompok PKH.

Kemudian tahun 2020 metode penyampaian informasi melalui sosialisasi (pertemuan) dan melalui media sosial yaitu grup whatsapp yang bernama “PKH DESA NGADIREJO” yang mencakup 15 RT dan 3 RW. Dan yang bergabung dalam grup whatsapp hanya terdapat 55 peserta dan 140 peserta tidak bergabung dalam grup whatsapp. Hal ini dikarenakan 140 warga penerima bantuan PKH lainnya tidak memiliki HP sehingga tidak dapat bergabung. Sehingga penyampaian informasi terkait program bantuan PKH yang melalui media sosial yaitu grup whatsapp belum maksimal.

Metode penyampaian yang digunakan dalam menyampaikan informasi terkait program keluarga harapan kepada masyarakat penerima bantuan PKH ini yang masih kurang. Hal ini disebabkan karena sosialisasi tersebut hanya dilaksanakan satu kali dalam setahun dan masih banyak warga yang tidak bergabung dalam grup whatsapp, sehingga penyampaian informasi mengenai tujuan program bantuan ini belum maksimal, maka seharusnya penyampaian sosialisasi ini dilakukan setiap satu bulan sekali dan semua warga penerima PKH bergabung dalam grup whatsapp guna menambah kejelasan informasi mengenai Program Keluarga Harapan supaya program ini terlaksana sesuai dengan tujuan program.

2. Sumberdaya

Pada Program Keluarga Harapan di Desa Ngadirejo peran sumber daya manusia sangatlah dibutuhkan dalam implementasi program bantuan PKH ini. Pada pelaksanaan program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ngadirejo dijalankan oleh beberapa pihak terkait seperti Pendamping PKH Desa Ngadirejo, Kasi Kesejahteraan

Desa Ngadirejo, Ketua Kelompok Desa Ngadirejo.

Dalam implementasi program bantuan PKH terdapat beberapa sumberdaya pelaksana yaitu dusun gemblo raseh yang diketuai oleh ibu parmi beranggotakan 50 orang penerima PKH, dusun jetis diketuai oleh ibu kaerti yang anggotanya sebanyak 74 orang penerima PKH, dan terakhir ibu dar'im sebagai ketua kelompok dusun tawangsari yang anggotanya sebanyak 71 orang penerima PKH.

Di dalam bantuan PKH ini terdapat beberapa kriteria penerima yaitu keluarga miskin yang mempunyai anak dari jenjang SD,SMP dan SMA serta ibu hamil, balita, lansia yang berusia lebih dari 70 tahun serta penyandang disabilitas. Dalam bantuan program keluarga harapan (PKH) ini memiliki anggaran yang berbeda-beda setiap keluarga miskin.

Anggaran yang diterima keluarga miskin yang memiliki anak sekolah dasar mendapatkan bantuan sebesar Rp 200.000, memiliki

anak yang bersekolah di SMP mendapatkan bantuan sebesar Rp 400.000, SMA mendapatkan bantuan sebesar Rp 500.000 serta ibu hamil maupun balita mendapatkan bantuan sebesar Rp 800.000 (Untuk ibu hamil hanya mendapat bantuan di tahap pertama saja) dan lansia serta penyandang disabilitas mendapatkan bantuan sebesar Rp 600.000.-

Sehingga dapat dilihat bahwa total anggaran untuk anak sekolah dasar tahun 2020 sebesar Rp 55.200.000 untuk anak sekolah menengah pertama yaitu sebesar Rp 61.200.000 untuk sekolah menengah atas yaitu sebesar Rp 63.000.000. Anggaran Rp 122.400.000 untuk balita, Rp 2.400.000 untuk ibu hamil, Rp 48.600.000 lansia, dan sebesar Rp 9.000.000 untuk penyandang disabilitas. Sehingga dapat ditotal anggaran

PKH Desa Ngadirejo tahun 2020 yaitu sebesar Rp 361.800.000.

Fasilitas yang berupa sarana dan prasana yang ada di Desa Ngadirejo yang berupa laptop, pc, printer, wifi yang dapat memperlancar proses administrasi dalam program bantuan PKH di Desa Ngadirejo. Dalam hal ini untuk fasilitas yang berupa sarana dan pra sarana yang ada di Desa Ngadirejo sudah memadai guna terlaksananya program bantuan PKH di Desa Ngadirejo.

Sedangkan, faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya informasi yang transparan dari pihak ketua kelompok PKH, sehingga warga kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana kriteria penerima PKH. Faktor penghambat yang selanjutnya adalah kurangnya pengawasan, suport serta kurangnya tindakan dari pendamping PKH. Dan hal ini juga dapat menyebabkan program bantuan PKH di Desa Ngadirejo berjalan dengan kurang maksimal.

3. Disposisi

Dalam proses pelaksanaan program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Ngadirejo dalam pelaksanaannya wilayah Desa di koordinir oleh ketua kelompok PKH yang mana setiap dusun terdapat 1 ketua kelompok dan pada satu desa di koordinir oleh 1 pendamping PKH yang merupakan delegasi dari kecamatan dan setiap melaksanakan kegiatan atau peran yang berkaitan dengan Program PKH harus sesuai dengan arahan dari pendamping PKH.

Warga penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang sebelumnya mengambil bantuannya lewat Kantor Pos dan menyiapkan foto copy KK, KTP, serta akta kelahiran anak yang mendapatkan bantuan PKH tersebut. Akan tetapi setelah ada e-PKH warga penerima bantuan PKH ini di mudahkan untuk pengambilannya dan hanya menyiapkan atm e-PKH saja.

Sikap pelaksana Program Keluarga Harapan dalam penyampaian informasi tentang tujuan PKH masih kurang pengawasan dan kurangnya dalam menyampaikan informasi dari pihak pendamping dan ketua kelompok yang kurang transparan dalam penyampaian informasi serta kurangnya rasa tanggung jawab.

4. Struktur Birokrasi

Pada suatu program struktur birokrasi dapat berpengaruh pada pelaksanaan suatu program. Struktur birokrasi dapat menghambat atau menghalangi koordinasi yang di perlukan oleh beberapa pihak pelaksana. Pada implementasi bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Ngadirejo sudah ada pembagian tugas dan kewajiban yang meliputi Pendamping PKH, Ketua Kelompok (per dusun terdapat 1 ketua kelompok). Koordinasi dilakukan pada saat adanya pertemuan bantuan Program Keluarga Harapan. Namun, di pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak terdapat struktur organisasi guna mencapai terlaksananya program bantuan PKH secara optimal.

Dalam program Keluarga Harapan terdapat alur pelaksanaannya yaitu perencanaan, penetapan calon peserta PKH, persiapan daerah, pertemuan awal dan validasi, penetapan keluarga penerima manfaat PKH, penyaluran bantuan, pendampingan, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), verifikasi komitmen, pemuthakiran data, transformasi kepesertaan PKH, sistem pengaduan masyarakat, e-PKH

Dalam pembagian tugas telah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing yang bersangkutan. Seperti halnya, 1 Ketua Kelompok PKH yang memegang 1 dusun yang nantinya akan berkoordinasi kepada Pendamping PKH pada setiap

bulannya. Pendamping PKH melakukan pengawasan terkait bantuan Program Keluarga Harapan yang berjalan dengan efektif guna menjamin bahwa semua bantuan dalam arah yang sesuai dan menuju pada pencapaian tujuan dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH).

Koordinasi dan monitoring yang dilakukan oleh ketua kelompok PKH dan pendamping PKH merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) secara optimal. Tidak adanya struktur kepengurusan yang lengkap di PKH Desa Ngadirejo menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan di Desa Ngadirejo karena dengan sumberdaya yang ada masyarakat kurang memahami informasi. Sehingga, sampai saat ini Program Keluarga Harapan di Desa Ngadirejo guna meningkatkan taraf pendidikan warga penerima bantuan PKH di Desa Ngadirejo masih belum terlaksana dengan baik.

SIMPULAN

1. Faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, hal ini disebabkan oleh pendamping PKH yang kurang memberikan sosialisasi dan kurang transparannya informasi dari pihak ketua kelompok PKH. Agar komunikasi komunikasi yang diharapkan berjalan dengan maksimal, maka diperlukan sosialisasi (pertemuan) yang rutin selama sebulan sekali dan terbukanya pihak ketua kelompok dalam memberikan informasi terkait Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Pada faktor sumberdaya yang meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran serta sumberdaya peralatan guna terlaksananya implementasi

program keluarga harapan sudah terpenuhi. Dalam implementasi program bantuan ini juga terdapat sumberdaya penghambat yaitu faktor penghambat lainnya yaitu kurangnya informasi yang transparan dari pihak ketua kelompok PKH, sehingga warga kurang mendapatkan informasi tentang bagaimana kriteria penerima PKH. Faktor penghambat yang selanjutnya adalah kurangnya pengawasan, suport serta kurangnya tindakan dari pendamping PKH. Dan hal ini juga dapat menyebabkan program bantuan PKH di Desa Ngadirejo berjalan dengan kurang maksimal. Adapun faktor pendukungnya yaitu fasilitas sarana dan prasarannya sudah memadai guna mendukung terlaksananya program bantuan PKH.

3. Faktor disposisi yaitu sikap pelaksana dalam implementasi kebijakan program bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) belum sesuai karena kinerja dari pendamping kelompok PKH ini masih kurangnya pengawasan dan kurangnya dalam menyampaikan informasi serta sikap dari ketua kelompok yang kurang transparan dalam penyampaian informasi serta kurangnya rasa tanggung jawab.
4. Faktor struktur birokrasi belum terdapat adanya struktur kepengurusan yang lengkap di PKH Desa Ngadirejo menjadi suatu hambatan dalam pelaksanaan program Keluarga Harapan di Desa Ngadirejo karena dengan sumberdaya yang ada masyarakat kurang memahami informasi.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahab, Solichin, Pengantar analisis kebijakan public, Universitas Muhammadiyah Malang press, Malang, 2008

- Arifin Tahir, Kebijakan Publik dan Transparasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Alfabeta, Bandung, 2014
- Eko Handoyo, Kebijakan Publik, Widya Karya, Semarang, 2012 Pepen Nazaruddin, Buku Pedoman PKH 2020, Kemensos, Jakarta, 2020
- Suprastiyo, A. (2020). Quality Of Birth Certificate Management Services in the Department of Population and Civil Registration Bojonegoro District.
- Sahya Anggara, Kebijakan Publik, Pustaka Setia, Bandung, 2014 Santosa, Pandji, Administrasi Publik,PT. Refika Aditama, Bandung, 2008
- Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005 R&D, Alfabeta, Bandung, 2016